

CATATAN PROSES KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT SIPIL

Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kuta Bali. 21 Desember 2020
Ramayana Suites & Resorts, Kuta, Kabupaten Badung – Bali



Dokumen ini diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Seluruh isi dokumen ini merupakan tanggung jawab INFID.

CATATAN PROSES

KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT SIPIL

**Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 serta
Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali,
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT)**

**Kuta Bali. 21 Desember 2020
Ramayana Suites & Resorts, Kuta, Kabupaten Badung – Bali**

**Editor dan layout dokumen oleh:
Tim Penulis INFID**

2020



DAFTAR ISI

Ringkasan	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
2. Pembukaan Acara	5
2.1 Pidato Pembukaan	5
2.2 Pidato Kunci	6
2.3 Paparan Kunci	8
3. Diskusi Sesi 1 dan Sesi 2	10
3.1 Diskusi Sesi 1	10
3.2 Diskusi Sesi 2	14
4. Penutupan: Rencana Aksi bersama	19
4.1 Rencana Aksi Bersama	19
4.2 Kata Penutup	20
Lampiran	22
1. Daftar liputan	22
2. Daftar hadir daring	23
3. Respon Peserta untuk Evaluasi Konsultasi Publik Bali	27

RINGKASAN

Menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Pada kerangka regulasi, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82/2020, tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2020 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dibantu oleh tiga Menteri Koordinator lainnya. Ditambah Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Wakil Ketua.

Upaya penanganan juga dilakukan dengan meningkatkan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga telah mengadakan refocusing struktur APBD untuk penanganan COVID-19. Penggunaan dana refocusing penting untuk dimaksimalkan oleh berbagai instansi khususnya di tingkat daerah untuk penanganan COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menyampaikan, hingga 31 Oktober 2020, pemerintah daerah baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 678,41 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 1.080,7 triliun. Dana ini penting untuk segera digunakan, agar perputaran ekonomi yang menurun karena pandemi dapat segera meningkat.

Melihat kondisi diatas, Kementerian Dalam Negeri kemudian berinisiatif mendorong upaya pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pemerintah daerah (pemda) melalui pengadaan barang dan jasa Swakelola Tipe III. Inisiatif ini dituangkan dengan disahkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/5538/S.J, mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Fasilitasi Kerjasama, Pemerintah Provinsi Bali, Ford Foundation, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan MDN Visionari Indonesia menyelenggarakan Konsultasi Publik, "Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)" di Kuta Bali, 21 Desember 2020. Kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme hybrid, yaitu kombinasi luring dan daring. Protokol kesehatan yang ketat dilakukan untuk mekanisme luring, yaitu peserta melakukan tes antigen sebelum memasuki ruangan kegiatan.

Konsultasi publik ini ditujukan sebagai wadah bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk berdialog dan bertukar gagasan tentang peluang dan tantangan dalam pelibatan LSM dan Ormas dalam penanganan COVID-19. Pidato kunci dalam kegiatan ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM yaitu Teten Masduki, Menteri Dalam Negeri, diwakili oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayah, Syafrizal ZA, dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Turut pula hadir Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, Heriyandi Roni, memberikan kata sambutan dan laporan persiapan kegiatan sebagai bagian pembuka acara.

Konsultasi publik dihadiri 180 peserta (119 peserta online, dan 61 peserta offline). Berdasarkan gender, yaitu 128 peserta laki-laki (70%), dan 52 peserta perempuan (30%). Peserta berasal dari kementerian/lembaga yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Lembaga Pengadaan Barang Jasa (LKPP), Kementerian BUMN dan BPJS ketenagakerjaan. Dihadiri juga oleh Forum Pimpinan Daerah (Forkompimda) Pemerintah Provinsi Bali, serta unsur dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Peserta lainnya berasal dari CSO nasional dan daerah, Bank Pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sektor privat (perhimpunan hotel dan restoran indonesia, UMKM setempat, dan lainnya), media dan unsur akademisi.

Pertemuan ini menghasilkan Rencana Aksi mengenai Kemitraan Masyarakat Sipil. Sektor UMKM dan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencegahan Penyebaran COVID-19. Rencana aksi ini ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Staf Khusus Mendagri dan Kepala Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, Pemerintah Provinsi Bali, Ford Foundation, INFID dan MDN Visionari Indonesia

Rencana aksi menyatakan kesepakatan bersama multipihak dari peserta, bahwa Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari dampak Covid-19 harus dijalankan selaras antara jaminan kesehatan warga dengan pemulihan ekonomi sebagai strategi integratif. Penanganan dan pemulihan COVID kedepan juga harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan masyarakat. Rekomendasinya agar akses dan peran serta masyarakat sipil termasuk sektor UMKM dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan melaksanakan program Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan karakter wilayah kerja masing-masing.

Pada sisi anggaran, rencana aksi merekomendasikan agar pemerintah daerah di Provinsi Bali, NTB dan NTT hendaknya dapat mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan kegiatan kemitraan antara pemda, ormas dan LSM sesuai skema Swakelola Tipe 3 dalam SE Mendagri. Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Swakelola Tipe 3 dalam SE Mendagri diprioritaskan pada upaya-upaya penanganan COVID- 19, Usaha Mikro Kecil Menengah, perlindungan sosial warga dan program-program padat karya





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mulai ditemukannya COVID-19 sejak dua kasus positif virus korona pada Maret 2020, kemudian secara resmi pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 13 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020. Gugus tugas yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertujuan untuk mempercepat penanganan kesehatan COVID-19 secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis .

Berkembangnya dampak COVID-19 juga kepada aspek sosial dan ekonomi, kemudian mendorong agar penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional menjadi satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dalam satu pintu. Oleh karenanya, kemudian ditetapkan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berlaku per 20 Juli 2020.

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dibantu oleh tiga Menteri Koordinator lainnya. Ditambah Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Wakil Ketua.

Mengingat koordinasi pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu kunci penanganan COVID-19, serta tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Mendagri kemudian mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur

dan Bupati/Wali kota Nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan Satgas Daerah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Surat edaran tersebut tersebut secara eksplisit mengharuskan dibentuknya Satgas COVID-19 hingga level terbawah yaitu RT/RW. Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera mengambil langkah – langkah kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di level daerah

Presiden juga telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut dikeluarkan untuk menegaskan dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi. Instruksi ini diberikan kepada para menteri kabinet, pihak TNI dan kepolisian, lembaga pemerintah non kementerian, kepala daerah untuk mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian COVID-19. Presiden Jokowi juga memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19 yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Tidak hanya dalam aspek regulasi, upaya penanganan juga terus dilakukan dengan

meningkatkan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan mengubah proyeksi kebutuhan biaya penanganan Covid-19 sejak diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Dari semula sebesar Rp 405,1 triliun menjadi sekitar Rp 695,2 triliun, yakni untuk bidang kesehatan dialokasikan Rp 87,55 triliun dan program PEN Rp 607,65 triliun.

Selain itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga telah mengadakan refocusing struktur APBD untuk direlokasikan dalam tiga komponen utama yaitu peningkatan kapasitas sektor kesehatan, anggaran untuk jaring pengaman sosial, serta dana untuk pemulihan ekonomi dengan sasaran utama UMKM.

Upaya penggunaan dana refocusing penting untuk dimaksimalkan oleh berbagai instansi khususnya di tingkat daerah untuk penanganan COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menyampaikan, hingga 31 Oktober 2020, pemerintah daerah baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 678,41 triliun atau baru sekitar 62,77% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.080,7 triliun . Dana ini penting untuk segera digunakan, agar perputaran ekonomi yang menurun karena pandemi dapat segera meningkat.

Melihat kondisi ini, Kementerian Dalam Negeri kemudian berinisiatif mendorong upaya pelibatan Lembaga Swadaya



Peserta melakukan tes antigen sebelum masuk ke ruangan

Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pemerintah daerah (pemda) melalui pengadaan barang dan jasa Swakelola Tipe III. Inisiatif ini dituangkan dengan disahkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/5538/S.J, mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Hal ini juga sebagai tindak lanjut amanat Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengenai kolaborasi dan pelibatan multipihak.

LSM dan Ormas sebagai bagian dari masyarakat, dapat merujuk pada organisasi dan juga ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan. Sebagai suatu ruang, LSM dan Ormas memiliki peran yang relatif penting dalam hal pembangunan melalui

pendekatan partisipatif dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam hal konteks pandemi, LSM dan Ormas kemudian diharapkan oleh masyarakat agar dapat lebih bekerja dalam layanan dan pendampingan bagi kelompok terdampak COVID-19. Namun demikian dengan dampak COVID-19 yang juga diterima oleh LSM dan Ormas, hal ini kemudian menjadi beban, memaksa kemudian LSM dan Ormas untuk melakukan cara melalui swadana dengan kemampuan yang terbatas dalam situasi pandemi COVID-19.

Pada perspektif lainnya, LSM dan Ormas juga mengharapkan perlindungan sosial bagi seluruh warga selama pandemi. Dengan pertimbangan data dan kemampuan, perlindungan warga melalui ketenagakerjaan dapat menjadi pilihan cepat dan tepat. Hal ini sesuai dengan arahan Wakil Presiden, agar meminta pemda dan pelaku usaha memperluas cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan . Manfaat yang diterima apabila terdaftar

yaitu bantuan pemerintah terkait pandemi Covid-19. Selaras dengan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN), pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk membantu pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, bagi yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk relaksasi iuran BPJS bagi pelaku usaha, agar dapat bertahan dalam situasi pandemi.

Untuk mendiseminasi dan menyusun tindak lanjut inisiatif tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu komponen di Kementerian Dalam Negeri yang bertugas memfasilitasi kerjasama Ormas/Lembaga Asing dengan mitra lokal di Daerah melalui perizinan, monitoring dan penguatan kerjasama sesuai dengan tujuan program pemerintah, dengan pelaksana oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan MDN News, disertai dukungan Ford Foundation, kemudian akan melakukan Konsultasi Publik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat Sipil serta Swasta untuk membangun sinergitas antar pihak terkait. Diskusi ini juga akan menjadi barometer/benchmark bersama dalam menciptakan rencana tindak lanjut skema kolaborasi di daerah lainnya untuk mendorong pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pandemi COVID-19.

1.2 Tujuan

1. Dialog kebijakan untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil di daerah dalam mendorong penanganan

COVID-19 dan pemulihan dampak sosial dan ekonomi di sekitar kawasan Provinsi Bali

2. Menyamakan persepsi Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta terhadap kondisi, pemahaman landasan regulasi yang menjustifikasi langkah tindakan serta penyamaan metode dalam rangka menyusun rencana aksi kolaborasi pencegahan penularan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19, sebagaimana didorong melalui SE Mendagri Nomor 440/5538/S.J. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia
3. Sosialisasi prosedur, prasyarat dan mekanisme pertanggungjawaban Pengadaan Jasa Barang (PJB) Swakelola Tipe III kepada LSM dan Ormas, yang dirujuk oleh SE Mendagri Nomor 440/5538/S.J. Sehingga konsultasi publik ini juga menjadi wahana diseminasi informasi bagi LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Dengan libatkan LSM/Ormas sebagai representasi peran masyarakat maka aneka dampak dapat dihasilkan seperti percepatan penyerapan belanja APBD di sektor penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan UMKM, penguatan peran serta masyarakat untuk pencegahan penularan COVID-19, dan terciptanya "collaborative governance" di tingkat masyarakat

2. PEMBUKAAN ACARA



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memberikan pidato pembukaan kegiatan

2.1 Pidato Pembukaan

**Wakil Gubernur Provinsi Bali,
Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati,
M.Si**

- Sudah Sembilan bulan, kita berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Perubahan situasi sangat dinamis sehingga harus dibarengi dengan dinamika kebijakan baik dari pemerintah pusat dan daerah. Walaupun penyebaran di bali cukup bisa dikendalikan, namun potensi perluasan penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi. Di satu sisi, dampak ekonomi akibat COVID-19 dalam sektor ekonomi semakin berat bagi Bali.

- Secara year on year, PDRB provinsi Bali pada triwulan 1 tahun 2020 terkoreksi menurun minus 7,67%, triwulan kedua menjadi 10,98%, triwulan ketiga jatuh lebih parah pada 12,28%. Hal ini berdampak sangat serius terhadap kesejahteraan masyarakat bali.
- Bahaya COVID-19 semakin nyata dan dampak ekonomi semakin parah. Pemprov bali sepakat dan patuh terhadap arahan. Pemda Bali berupaya untuk mengendalikan COVID-19 dengan 2 upaya 1) Kita tidak boleh lengah dengan mengendalikan 3T 2) Adaptasi dengan kebiasaan yang disebut dengan Bali Era Baru (masyarakat tetap produktif dengan tetap memperhatikan protokol

kesehatan). Tatanan Bali Era Baru adalah salah satu kunci kebangkitan produktivitas.

- Kami menyadari strategi tersebut tidak mudah dilaksanakan. Sasarannya adalah perubahan perilaku yang membutuhkan proses serta kesadaran kolektif. Sehingga, sumber daya dan sinergitas menjadi sangat penting. Karena itu saya menyambut baik konsultasi kemitraan pemerintah dengan masyarakat sipil. Sinergi antar berbagai pihak niscaya akan membuat upaya pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi lebih efektif dan efisien.

• Mendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Secara prinsip, menegaskan peran gubernur dan walikota sebagai sub sistem nasional dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara sinergi pusat, daerah dan masyarakat. Termasuk konsekuensi hukum dan sanksi apabila terjadi pengabaian.

- Membaiknya angka kesembuhan diatas 80% mengindikasikan treatment penanganan COVID-19 membaik.
- Rata-rata kasus aktif di Indonesia yaitu 15,2%. Capaian ini lebih baik dari rata-rata dunia di persentase 27,85%
- Rata-rata kesembuhan 81,89%. Capaian ini juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata dunia yaitu 56%
- Namun, angka kematian kita masih lebih tinggi dibandingkan angka kematian dunia. Hal ini bisa ditangani dengan mendeteksi penderita COVID-19 lebih awal.
- Dalam konteks kolaborasi, 1) Membangkitkan energi bangsa melalui partisipasi aktif. Dunia memandang kita sangat optimis. Menurut WB, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,4% IMF 6,1% dan IDB 5,3%. Hari ini kita masih minus, namun akan

2.2 Pidato Kunci

**Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,
Dr. Safrizal ZA, MSi**

- Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya aparatur pemerintah dan penegak hukum namun semua lapisan masyarakat
- Apabila kita ingin menyelesaikan tugas, kita cukup bekerja. Apabila kita ingin mencapai visi dan tujuan, kita harus bekerja sama.
- Keselamatan adalah hukum tertinggi. Oleh karenanya, penegakan hukum dan disiplin harus dilakukan terus. Presiden meminta untuk terus-menerus menegakkan disiplin, memperkuat 4M dan terus meningkatkan kapasitas 3T.

terus diupayakan perbaikan. Harapannya optimisme dunia akan kita jawab dengan kerja keras. Sektor yang paling tangguh teruji adalah sektor kecil dan mikro dalam semua krisis contohnya krisis 1998. Hari ini pun demikian. Ketika ekonomi besar collapse, ekonomi mikro menggeliat.

- Penanganan pandemi dalam skema management crisis. Ada krisis yang menjawab penanganan sehingga dibutuhkan terobosan yang sistemik. Dalam hal ini, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 440/5538/SJ, mengenai Kemitraan antara Pemda dengan LSM dan Ormas dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah. Upaya ini untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada titik ini, masyarakat sipil tidak menjadi objek namun juga subjek pembangunan. Tidak hanya mengawasi namun berpartisipasi. Tidak membantu namun ikut melaksanakan. Dalam kondisi pandemi dan krisis, kita mendorong partisipasi publik yang lebih tinggi.
- Kolaborasi strategic pentahelic harus menjadi formula kerjasama guna membangun sistem yang resilience/tangguh. Kerja bersama penting, sama-sama bekerja juga jauh lebih penting. Termasuk didalamnya penguatan koordinasi pimpinan daerah. Kolaborasi merupakan suatu keharusan yang dijalankan sekarang dan pembangunan lebih lanjut
- Anggaran pemerintah yang dialokasikan

besar hampir 80 triliun dalam bidang kesehatan dan 600 triliun dalam bidang ekonomi. Untuk itu, membutuhkan kontrol publik sehingga anggaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan

- Penting bagi masyarakat untuk berperan sebagai komunikator publik. Besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak akan berdampak apabila komunikasi tidak berjalan. Dalam post truth, banyak hoax yang beredar, selalu ada sisi lain dari berita yang disampaikan.
- Selain itu ada agenda besar setelah ini yaitu agenda vaksin yang perlu dikomunikasikan kepada publik terus-menerus. Kita akan pulih dalam dua macam 1) Ketemu vaksin yang fix atau 2) Ketemu obat yang fix.
- Sudah ada peraturan mengenai Swakelola Tipe 3 yang cukup lama sebelum kemendagri mengeluarkan SE Mendagri untuk mendemamkan. Namun, inisiatif ini perlu diinkubasi untuk meningkatkan trust, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga masyarakat sipil dan LSM. Hal ini belum banyak dilaksanakan sehingga sosialisasi dan contoh daerah yang sudah mulai menyelenggarakan menjadi peluru tajam untuk mendorong.
- Beberapa keuntungan untuk menyelenggarakan Swakelola Tipe 3: 1) Menjangkau daerah yang remote (yang tidak terjangkau) 2) Makin dikerjakan bersama publik, trust semakin tinggi. Kuncinya adalah mutual trust.

- Para LSM dan NGO sebagai co creator, explorer, ideator, diffuser. Kesibukan membuat pemerintah terbatas untuk mengeksplor sesuatu. Harapannya akselerasi pembangunan termasuk peningkatan ekonomi masyarakat lebih terdorong. Sektor mikro sangat membutuhkan sentuhan perorangan dan berkelompok. Apabila hanya dari pemerintah tidak akan cukup.
- Kolaborasi ini menjadi platform kerja bersama di tahun 2021 karena tantangannya masih sama besar. Semoga niat baik ini mampu menjadikan kita lebih kuat dan mampu untuk menghadapi COVID-19, meningkatkan stabilitas politik, dan meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia.

2.3 Paparan Kunci

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki

- Outlook perekonomian Indonesia: Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19 sempat menyentuh angka -5,32% di triwulan II (terendah sejak 1999) dan -3,49% di triwulan III 2020. Proyeksi kisaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 4,5 – 5,5%
- Ringkasan Realisasi Program PEN pada Kementerian Koperasi dan UKM: 1) BanPres Produktif Usaha Mikro (100%) 2) Subsidi KUR (57,29%) 3) KUR Supermikro (27,75%) 4) Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi Melalui LPDB (100%). Tambahan

Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi Melalui LPDB (51,64%) 5) Subsidi Non-KUR (BLU-Koperasi) (1,33%)

- Hasil Survey Dampak Program PEN Terhadap UMKM: 99% UMKM responden yang ikut mendaftar sudah menerima bantuan hanya 1% yang belum menerima. Mayoritas responden menggunakan dana yang diperoleh dari program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%), dan pemenuhan kebutuhan Pribadi (13%)
- Hasil Survei Penerima Program Banpres Produktif:
 - » Sektor Lapangan Usaha penerima program, mayoritas penerimanya pedagang eceran (37,7%) dilanjutkan dengan penyediaan makanan dan minuman. Mayoritas penggunaan dana bantuan program untuk bahan baku (88,5%). Mayoritas penerima Program tidak memiliki pekerjaan lainnya (44,9%). Mayoritas unit usaha memiliki omzet kurang dari Rp15 juta/bulan dan melakukan metode penjualan melalui offline.
 - » Sebagian besar unit usaha mengaku mengalami kendala penurunan permintaan (86%) diikuti kesulitan kas untuk operasional usaha (65,5%) dan terjadinya kenaikan harga bahan baku (51,8%)
 - » 97,15% penerima BPUM kegiatan usahanya masih berjalan per November 2020
- Saat ini kami sedang menyusun RPP UU Ciptaker, UMKM dan Koperasi diharapkan dapat mempercepat transformasi



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan pidato kunci secara daring

UMKM dari sektor informal menjadi formal. Adanya peluang pasar: belanja pemerintah sebesar 40% harus diberikan untuk produk UMKM. Kami juga ada kerjasama dengan kementerian BUMN, 14 miliar ke bawah diperuntukkan untuk UMKM.

- Harapannya konsultasi publik dapat menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021

3. DISKUSI SESI 1 DAN SESI 2

3.1 Diskusi Sesi 1

Kondisi Makro Strategis Mengenai PEN dan UMKM, dimoderatori oleh Ibu Ezki Suyanto: Penasehat Khusus Komunikasi Menteri Koordinator Marives

Moderator oleh Ibu Ezki Suyanto: Penasehat Khusus Komunikasi Menteri Koordinator Marives

- Deputi Direktur Wilayah Bali Nusa Papua BPJS Ketenagakerjaan, Deny Yusyulian
- BPJAMOSTEK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) memiliki mandat Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Efektif berjalan 4 program. Terkait dengan UU Cipta Kerja, kami mendapatkan amanat baru untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
- Dasar Hukum: UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011 dengan total 30,2 juta peserta aktif (Okt 2020) serta total dana 451,7 triliun.
- Pertumbuhan Ekonomi Bali Minus 12, angka pengangguran di sektor pariwisata melonjak. Dari perspektif nasional, kita sudah menuju resesi.
- Dari sisi pengangguran, sejak Maret 2020, terdapat 3,5 juta pekerja yang ter-PHK, sehingga total pengangguran naik

menjadi 10,3 juta orang.

- Dampaknya di Bali, 85.3140 orang yang terdampak COVID-19 dari segi ekonomi
- Jumlah tenaga kerja aktif menurun secara drastis. Semester I-2020, tren peserta aktif terus turun dan bahkan pada bulan Mei s.d Sep 2020 berada di bawah pencapaian 2019. Nilai ini bahkan lebih kecil dari pencapaian terendah bulanan di sepanjang tahun 2019 (Feb 2019 = 30,4 juta). TK Keluar pada semua segmen mencapai 14,2 juta di akhir Juli 2020 terbesar sektor jasa konstruksi 6,6 juta.
- BP Jamsostek: Stimulus Ekonomi dan Program Pemulihan
 - » Stimulus Ekonomi: 1) Menyediakan 73.180 masker and 2.720 hand sanitizer bagi Pekerja Migran Indonesia 2) Makan siang gratis untuk driver transportasi online, berkolaborasi dengan 150 warteg 3) Donasi insan BPJAMSOSTEK bagi 18.355 relawan BNPB – COVID19
 - » Program Pemulihan: 1) Mendukung Pemerintah distribusi Bantuan Subsidi Upah bagi 12,4 juta pekerja dari target 15,7 juta 2) Relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan membangun infrastruktur Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 3) Mendukung pemerintah dalam rencana distribusi vaksin COVID-19 kepada masyarakat pekerja

- Term Pembayaran Klaim JAMSOSTEK:
Pada periode Maret s.d Mei 2020, pengajuan klaim mengalami penurunan lebih rendah dari tahun 2019, dan setelahnya melonjak tinggi. Bukan karena demand yang turun, melainkan kapasitas layanan kita belum siap saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak fenomena PHK.
- BP JAMSOSTEK belum optimal menangkap ekspektasi peserta, yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a) Data belum handal b) Big data belum dimanfaatkan c) Customer experience and engagement dengan peserta belum terkelola secara optimal d) Cost pengelolaan infrastruktur dan koneksi layanan belum efisien. e) Perubahan mindset layanan belum cukup signifikan untuk memenuhi ekspektasi dan praktik digitalisasi.
- Wajah Baru Pelayanan Publik BP JAMSOSTEK: 1) Keselamatan Karyawan 2) Keselamatan Peserta. Inovasi diantaranya: 1) LAPAK ASIK 2) One to Many 3) Transformation Digital 4) GN Lingkaran - Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 5) Agen PERISAI – Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Di Bali, memiliki 34 Perisai.
- BPJAMSOSTEK juga mengupayakan INSANOVA (Internalisasi Budaya Kreatif dan Inovatif untuk Percepatan Perbaikan Proses Berkelanjutan). Kami adalah lembaga negara yang akan bersama pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan UMKM Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Dr.
Iwan Faidi, Ak., MSM**

- Pertumbuhan ekonomi Q3-2020 terkontraksi -3,49% (yoy). 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja & mayoritas masyarakat berpendapatan rendah (<=1,8jt) mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan
- 2,56 Juta Orang Pengangguran karena COVID-19, 1,77 Juta Orang Sementara tidak bekerja karena COVID-19; 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter hours) karena COVID-19
- Sejumlah indikator menunjukkan ekonomi mulai pulih sejak pertengahan Juni 2020, namun pada pertengahan September 2020, pembatasan diberlakukan kembali di DKI Jakarta karena meningkatnya kasus COVID-19 dan mengakibatkan PMI Manufaktur terkontraksi, inflasi melambat, dan Indeks Keyakinan Konsumen menurun.
- Berdasarkan Kata Data (2020), Mayoritas UMKM (82,9%) mengalami dampak negatif pandemi dan hanya 5,9% yang mengalami dampak positif. 63% UMKM terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30% dan hanya 3,8% yang omsetnya meningkat
- Strategi Pemerintah dalam penanganan COVID-19 diantaranya pemulihan ekonomi nasional. Dari total anggaran, dukungan untuk UMKM yaitu 115,82 T. Rincian realisasi penempatan dana:

Pembiayaan investasi LPDB, PPh final UMKM DTP, Subsidi Bunga UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, Banpres Untuk Usaha Mikro. Realisasi anggaran 91,93% (106,46T)

- Program Stimulus KUR pada masa pandemi COVID-19; Kur Super Mikro, Tambahan subsidi bunga KUR, Subsidi Bunga untuk Debitur KUR. Realisasi KUR Jan s/d 31 Oktober 2020 sebesar 151,73 T (79,86% dari target tahun 2020 sebesar 190 T) dan diberikan kepada 4,65 juta debitur.
- Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia: Telah di launching pada tanggal 14 Mei 2020 sebagai bentuk upaya mitigasi dampak COVID-19 bagi UMKM serta mendorong belanja produk buatan Indonesia. Bentuk dukungannya: Dukungan top local brand, E Katalog UMKM, Penyaluran pinjaman oleh Himbara yang memanfaatkan big data platform ecommerce, Platform digital yang mempertemukan UMK dengan BUMN, Standarisasi pembayaran, gerakan belanja di warung tetangga. Per 19 November 2020 sudah 3,2 juta unit UMKM onboarding pada market online, (melampaui target 2 juta (UMKM). Diperkirakan sampai akhir 2020 mencapai 3,5 juta UMKM onboarding
- Dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian UMKM, diperlukan sinergi seluruh stakeholders (Pentahelix), yaitu ABCGM (Akademisi, Business/ Pelaku Usaha, Community/Komunitas, Government/Pemerintah pusat dan daerah, dan Media.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali, I Wayan Mardiana

- Pandemi sangat berdampak terhadap sektor pariwisata di Bali.
- Visi Pemerintah Bali "Menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan Gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, Sakala-Niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai NKRI berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945
- Visi tersebut menuju BALI ERA BARU, yaitu : Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raha, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: Dimensi Pertama (menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali), Kedua (memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi) dan Ketiga (manajemen resiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global)
- Visi menuju Bali Era Baru tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif



Sesi Utama Dirjen Bina Adwil Kemendagri Syafrizal ZA dengan moderator Penasehat Khusus Kemenko Marinves Ezki Rezeki

pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.

- 5 Bidang prioritas pembangunan Bali 1) Pangan, sandang dan papan 2) Kesehatan dan Pendidikan 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 5) Pariwisata. Lima Bidang Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
- Pertumbuhan Ekonomi Bali Secara YoY: Triwulan III 2020 perekonomian Bali mulai menunjukkan pemulihan tercermin dengan pertumbuhan sebesar 1,66% (qtq). Triwulan lalu yang sebesar -7,24% (qtq). Perbaikan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas pada era tatanan

kehidupan baru. Namun, perekonomian belum dapat kembali ke level 2019, sehingga secara yoy masih terkontraksi sebesar -12,28% (yoY). Di Tingkat Nasional, triwulan II mencapai -3,49%.

- Berdasarkan hasil survei: 3 sektor usaha tertinggi mengalami penurunan pendapatan: 1) akomodasi dan makan minum (92,47%), jasa lainnya (0,90%) transportasi dan pergudangan (92,34%)
- Percepatan realisasi Program Infrastruktur Kementerian di Bali tahun 2020: 1) Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Ceningan, Kementerian Perhubungan. 2) Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Kementerian PUPR. 3) Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, Kementerian PUPR. 4) Pengembangan Stadion Kapten Dipta di Kabupaten Gianyar, Kementerian PUPR. 5) Pembangunan Pasar Sukawati Blok C di Kabupaten Gianyar, Kementerian PUPR. 6) Pembangunan Proyek normalisasi Tukad Unda di Kabupaten Klungkung, Kementerian PUPR. 7) Pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, PT. Angkasa Pura I. 8) Pengembangan Pelabuhan Benoa, PT. Pelindo III.
- Paket kebijakan penanganan COVID 19 provinsi bali pada sektor ekonomi/usaha peraturan gubernur bali nomor 15 tahun 2020 tentang paket kebijakan percepatan penanganan coronavirus disease 19 (COVID- 19) di provinsi Bali
 - » Penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi dengan pagu sebesar Rp. 220.000.000.000,-

- (dua ratus dua puluh milyar rupiah). Kelompok usaha informal Rp 100.000.000.000; Kelompok UMKM dan IKM Rp 65.620.000.000; Kelompok Koperasi Rp 43.880.000.000,-
- » Subsidi bunga bagi debitur UMKM (KUR dan Non KUR) di BPD Bali
 - » Subsidi bunga bagi debitur UMKM (KUR dan Non KUR) di luar BPD
- Realisasi Data Penyalur KUR Menurut Kab/Kota Per 14 Desember 2020: Jumlah Debitur 122,481, 12 sektor, total nilai akad 5,2 triliun, total outstanding 4,2 triliun.
-
- Data Usulan koperasi di Bali untuk memperoleh subsidi bunga non kur: 49 Koperasi dengan 13.570 jumlah debitur.
 - Jenis usaha mikro kecil menengah di kab/kota se-Bali per Agustus 2020: Jumlah 327.310: Perdagangan 111.292 UMKM, Industri Pertanian 135.136 UMKM, Industri Non Pertanian 50.488 UMKM dan Aneka Jasa 22.569 UMKM
 - Data penerima program pemulihan ekonomi nasional bantuan produksi usaha mikro di provinsi Bali TH 2020 sebesar rp 2,4 juta/usaha mikro: Jumlah usulan 305.072. Realisasi 216.956 orang dengan nominal 520.694.400.000
 - Meningkatkan penggunaan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal bali dengan teknologi digital dengan a) Memperluas aktivitas Pasar Gotong Royong Krama Bali dengan memakai QRIS. b) Pameran virtual untuk Produk UMKM, IKM, dan Koperasi,

mendukung Pergub No.99 Tahun 2018. c) Menyelenggarakan pameran pangan dan sandang produk UMKM, IKM, dan Koperasi di Ardha Chandra setiap bulan sekali selama 2 hari (Sabtu dan Minggu) d) Festival Minuman Lokal Bali memperebutkan Piala Gubernur Bali e) Kunjungan instansi Pemerintah Daerah, instansi vertikal termasuk BUMN, dan swasta ke obyek wisata di Bali (Gathering, Touring).

3.2 Diskusi Sesi 2

Kolaborasi dan Rencana Aksi Pemda dan Masyarakat Sipil melalui SE Mendagri

Dimoderatori oleh Mickael Bobby Hoelman - Penasihat Ahli INFID

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga

- COVID bukan hanya masalah Indonesia namun semua negara, tidak hanya mengguncang sistem kesehatan namun juga sektor ekonomi. Sehingga tidak ada formula fit for all untuk menangani COVID
- Ada 3 faktor dalam penyusunan kebijakan: 1) Sektor kesehatan (bagaimana kapasitas tidak hanya rumah sakit, nakes namun juga sistem untuk merespon wabah COVID-19). Dari segi infrastruktur, sistem kesehatan perlu pengembangan dan reformasi 2) Dampak Sosial ekonomi. COVID-19 telah membuat dampak ekonomi yang dahsyat, mengganggu supply chain, hampir 40 juta tenaga kerja disektor formal harus

di rasionalisasi (PHK, dirumahkan dll). 3) Sektor Sosial. Terjadi guncangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok khususnya bagi masyarakat di lapisan menengah kebawah. Untuk itu, banyak upaya pemerintah diantaranya refocusing dan realokasi APBD dan APBN untuk merespon jaringan pengaman sosial, sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Terdapat surat keputusan bersama dengan kementerian keuangan untuk refocusing dan realokasi anggaran untuk mendapatkan postur APBD yang lebih responsif merespon pandemi COVID-19

- Sektor swasta merosot tajam, pertumbuhan ekonomi dari 5,5% langsung menukik menjadi minus. Mencoba merespon dengan kebijakan strategi pemulihan ekonomi yang diibaratkan sebagai rem dan gas. Sektor kesehatan dan ekonomi tidak berjalan terpisah melainkan integratif dan beriringan. Ini menjadi kebijakan dari pemerintah pusat yang diluncurkan oleh presiden dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Dari segi kebijakan makro penanganan COVID-19 sudah sangat jelas. Namun, perlu didorong dengan implementasi di tingkat mikro yang merupakan pekerjaan masing masing sektor termasuk Kemendagri.
- Berdasarkan UU no 23 tahun 2014, Kemendagri berperan sebagai

koordinator pembina dan pengawas pemerintah daerah yang terdiri dari daerah otonom tingkat provinsi kabupaten/kota yang berjumlah 548 Pemda. Dalam kebijakan baru, mendagri memiliki tugas untuk sosialisasi kebijakan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 mengenai rem dan gas penanganan COVID-19 yang harus berlangsung dengan simultan melalui sinergitas pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

- Mendagri telah menempuh beberapa hal fundamental: a) Menurunnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan terpukulnya sektor swasta mengakibatkan peran sektor negara sangat dominan. Pemulihan ekonomi tidak bisa diharapkan dari luar struktur anggaran. APBD dan APBN menjadi penting untuk stimulus di tingkat lokal. Hal ini terus didorong untuk percepatan realisasi belanja APBD. Hampir setiap bulan, kemendagri memonitor penyerapan di daerah. Dari laporan, per 10 Desember, telah terjadi kenaikan realisasi anggaran mencapai 80% ke atas, walaupun hampir 247 triliun dana pembangunan yang masuk APBD masih tersimpan dan belum dipakai di daerah. Ada suatu situasi yang ironi, disatu pihak kita membutuhkan akselerasi pemulihan ekonomi yang membutuhkan dana di lain pihak, ada dana menganggur. Sehingga, kita perlu mencari bottle neck gap tersebut.
- Kalau dihadapi sendiri oleh pemerintah atau masyarakat tidak mungkin terselesaikan, maka ini adalah tantangan

bersama. Harus ada suatu paradigma membangun kemitraan pusat dan daerah, daerah dengan sektor swasta. Sektor swasta didominasi oleh UMKM yang berada di daerah. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi karena domain pekerja mayoritas dan memiliki kontribusi besar. Sektor Masyarakat sipil juga telah berkiprah dalam aspek pembangunan di masyarakat, misalnya pendampingan di berbagai bidang. Dari catatan, hampir sekitar 800 ribu organisasi masyarakat termasuk LSM yang terdaftar secara resmi di pemerintah

- Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 440/5538/SJ tertanggal 6 Oktober 2020, mengenai Kemitraan antara Pemda dengan LSM dan Ormas dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah. Upaya ini untuk membangun kemitraan bersama ormas dalam rangka pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan swakelola tipe III. Maka, misi kita di Bali untuk menyamakan persepsi dengan rekan pemda, UMKM dan ormas untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19
- Bagaimana data realisasi anggaran penanganan COVID-19 di provinsi Bali, NTB dan NTT. Untuk daerah NTB, realisasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi hanya 37%. Walaupun di porsi lain seperti jaring pengaman sosial sudah bagus (94%). Di belanja bidang kesehatan masih rendah 58%. Bahkan beberapa Kabupaten seperti Sumbawa Barat, untuk realisasi dampak ekonomi belum dipakai. Padahal mungkin dana tersebut dibutuhkan. Hal ini kita anggap sebagai masalah kelembagaan.
- Data NTT, untuk belanja bidang kesehatan masih 58%. Untuk belanja jaring pengaman sosial 94,18%, untuk dampak ekonomi masih 37,39% (masih rendah). Banyak kabupaten masih 0 dalam penanganan dampak ekonomi misalnya Kabupaten Sumba Tengah.
- Data Bali, penanganan dampak ekonomi 99,14% dari alokasi 103 miliar. Untuk jaring pengaman sosial 96% dari alokasi 199 miliar, untuk belanja bidang kesehatan juga tinggi 95%. Namun, ada beberapa daerah, misalnya Kabupaten Klungkung dampak penanganan ekonominya masih rendah yaitu 37%. Ada di Bali yang pencapaian pemulihan ekonominya masih 0% yaitu Gianyar. Yang tinggi adalah kontribusi dari beberapa kabupaten yang dalam alokasi anggarannya rendah.
- Hal ini menerangkan penting untuk melihat peta kabupaten di tingkat provinsi, mana yang visible kita dorong di dalam rangka menerapkan kebijakan swakelola berdasarkan kemitraan pemda dan LSM. Agar konsultasi kita tidak hanya sekedar wacana, namun berangkat data dari lapangan dan mengarahkan respon ke daerah yang telah disebutkan. Sehingga percepatan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi bisa langsung terjadi dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
- Ada banyak contoh kearifan lokal masyarakat: misalnya pada bulan April,



FORKOMPIMDA Provinsi Bali turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi publik

Universitas Udayana bersama Polda Bali dan beberapa UKM telah memproduksi hand sanitizer berasal dari arak bali. 2) Inisiatif komunitas untuk menyediakan APD dengan spesifikasi tertentu dengan harga terjangkau. Hal ini diproduksi secara lokal. 3) Di Muna, Sulawesi, ada hand sanitizer berbahan air nira. Kualitasnya terbukti bagus dsb. Hal Ini contoh bahwa swakelola sangat ril untuk belanja post pembangunan.

- Mari bersama membangun kemitraan bukan sebagai wacana, namun sebagai jalan kekuatan sektor masyarakat, pemerintah dan swasta demi kepentingan bangsa.

Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggar LKPP, Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP.

- Sebenarnya membangun sinergi dengan masyarakat sipil melalui kegiatan yang dilakukan secara swakelola bersama-sama dengan ormas bukan kebijakan baru, hanya saja mungkin persepsinya perlu kita luruskan bahwa kadang kalau mendengar swakelola, seolah-olah

itu kegiatan yang kecil. Kegiatan yang dibawah 200 juta. Hal Ini perlu kita ubah, tidak mengenai nilainya namun bagaimana cara melaksanakan kegiatan kita.

- Yang selama ini kita pahami kalau melaksanakan kegiatan dilakukan oleh penyedia, prosesnya tender dengan nilai triliunan. Namun tidak tertutup kemungkinan, cara menyelesaikan kegiatan kita melibatkan peran serta/kolaborasi dengan semua elemen masyarakat termasuk ormas karena mungkin saja mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki penyedia barang/jasa pada umumnya
- Perlu kita design, tujuan dan mekanisme kegiatan dengan swakelola yang melibatkan ormas bahkan sejak perencanaan
- Kelemahan: pada waktu mengelola kegiatan swakelola, maka organisasinya memang harus dirancang sedemikian rupa (tim).

- Fungsi monitoring dan pengawasan penting untuk meninjau apakah kegiatan sudah mencapai tujuan atau tidak.
- Apabila kita merasa kegiatan lebih cocok dilakukan oleh ormas, maka tidak ada salahnya design kegiatan dilakukan dengan fgd seperti ini dengan ormas dengan format yang lebih teknis.
- Semua ormas yang terlibat harapannya dapat berbadan hukum, memiliki NPWP, struktur organisasi, neraca keuangan yang teraudit dll.
- Alur yang terjadi biasanya konsekuensial baik kontrak, persiapan, monitor, serah terima.
- Evaluasi selama ini mengapa CSOs tidak banyak terlibat dalam mekanisme swakelola: keberanian untuk masuk dalam format fgd perlu didorong bersama.

Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo

- Untuk operasionalisasi, ada 4 untuk membumikan swakelola:
 - » Di tingkat pusat harus ada support facility: outputnya ada juklak dan juknis bagaimana swakelola bisa mendarat dengan APBD di bangda. Tanpa operational guidance, akan banyak kebingungan. Sebaiknya ada tim yang menjadi desk hub yang siap menjawab apabila ada pertanyaan.
 - » Harus ada bantuan teknis yang sifatnya ke lapangan. Bantuan teknis lebih ke program apa yang relevan untuk pencegahan COVID dan pemulihan ekonomi. Jika diperlukan, perorangan dan organisasi membuat design program.
- » Harus ada unit program yang sifatnya diseminasi memberikan contoh yang telah dilaksanakan. Desk hub yang sifatnya umum atau khusus. Sebenarnya LKPP sudah ada buku teknis rinci, namun bagaimana swakelola diterapkan saat masa pandemi belum ada.
- » Perlu ada uji coba di 50 -100 kabupaten kota. Kendala dimana dan faktor keberhasilan serta inputnya bagaimana.
- Kendala: trust dari pemda, dari sisi ormas, biasanya sanggup jika wilayahnya kecil. Namun, kapasitas teknis dan efektifitas tidak diragukan
- Penting juga untuk fokus dimana sektor paling urgen dalam masa pandemi: setuju UMKM harus menjadi fokus. Namun, menurut survei yang dilakukan INFID, beberapa hal yang patut menjadi perhatian juga diantaranya pelayanan kesehatan dengan perbanyak 3T, layanan ekonomi dan informasi. Diantaranya juga penguatan RT/RW dan desa dengan teknologi. Sehingga, praktik baik di berbagai daerah bisa dilakukan. Di Salatiga, agar para guru bisa sekolah, tesnya ditanggung dengan dana pemerintah. Hal ini perlu didesiminasi.
- INFID sangat mendukung untuk mengoperasionalisasikan/membumikan swakelola Kemendagri. Yang perlu kita sadari, kita perlu hal teknis dan operasional disamping diseminasi. Kita optimis bisa, namun syarat teknikal juga bisa kita cepat dorong.

4. PENUTUPAN: RENCANA AKSI BERSAMA

4.1 Rencana Aksi Bersama

Rangkaian Konsultasi Publik ditutup dengan pembacaan dan penandatangan Rencana Aksi Kemitraan Masyarakat Sipil, Sektor UMKM dan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencegahan Penyebaran

COVID-19. Rencana aksi ini ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Staf Khusus Mendagri dan Kepala Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Pemerintah Provinsi Bali, Ford Foundation, INFID dan MDN Visionari Indonesia



Kemitraan Masyarakat Sipil, Sektor UMKM dan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Kami para pihak, terdiri dari Ormas/LSM, UMKM dan OPD tiga Propinsi yaitu Bali, NTB dan NTT yang merupakan peserta Konsultasi Publik yang hadir hari ini menyepakati bahwa Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari dampak Covid-19 harus dijalankan secara bersamaan sebagai strategi integratif untuk tujuan menjaga keselamatan masyarakat dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

2. Kami para pihak dan peserta yang hadir hari ini memahami dan berkomitmen untuk mendukung agar Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak dari COVID-19 dilakukan bersama-sama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kami merekomendasikan agar akses peran serta masyarakat sipil termasuk sektor UMKM dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan melaksanakan program-program Penanganan Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak dari COVID-19 sesuai dengan karakter wilayah kerja masing-masing.

3. Berdasarkan tugas dan wewenang serta prioritas pemerintah pusat sesuai dengan Perpres No 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang kemudian dijabarkan antara lain dalam SE Mendagri No 440/S148/2020 tentang pembentukan Satgas Daerah, SE Mendagri No 440/S538/SJ, tentang Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, kami memahami dan bersepakat untuk memperkuat dan melaksanakan kemitraan, serta sinergi kerja antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan ormas-LSM di tahun 2021 dan seterusnya, dalam program-program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak dari COVID-19.

4. Kami memahami dan bersepakat bahwa model dan praktik kemitraan yang baik yang telah didiskusikan dan dibahas dalam konsultasi publik ini akan direplikasi ke provinsi/wilayah lainnya, terutama dalam mendorong peran serta masyarakat, sektor swasta termasuk UMKM, ormas dan LSM. Kami bersepakat Pemerintah, khususnya, Kemendagri, mengambil peran koordinatif untuk memfasilitasi replikasi konsultasi publik di daerah lain.

5. Kami mendorong agar Pemerintah Pusat secara khusus membentuk jaringan



4.2 Kata Penutup

**Alexander Irwan, Country Representative
Ford Foundation Indonesia**

- Ford Foundation sangat mendukung dan sangat mengapresiasi kegiatan. Seperti yang sudah dikemukakan, kemitraan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penanganan pandemi dan

pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bentuk kemitraan dengan LSM yaitu melalui mekanisme swakelola 3 yang sumber dayanya sudah diatur. Kami akan mengupayakan supaya rencana aksi tersebut bisa mendorong pemda untuk mengalokasikan sumber daya dan mendorong implementasinya melalui mekanisme swakelola 3.



Penandatanganan Rencana Aksi Bali secara multipihak oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Bali, Ford Foundation, INFID dan MDN Visionari Indonesia

- Seperti yang disampaikan sebelumnya, diperlukan adanya pemetaan LSM berdasarkan spesialisasi serta pemberdayaan LSM supaya bisa bermitra dengan pemerintah. FF melalui program pemberdayaan masyarakat sipil akan memperhatikan usulan ini dan membantu upaya pemberdayaannya. Dari sisi donor bukan hanya FF yang mendorong efektivitas implementasi swakelola namun juga DFAT australia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng, upaya ini harapannya bisa diuji cobakan supaya dapat terlihat dampaknya. FF telah melakukan kerjasama sejak 1953, sehingga sudah 67 tahun berada di Indonesia. FF akan terus mendukung upaya pemerintah agar pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan lebih merata dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan kerjasama kemendagri, pemda dan kementerian terkait.

Program Officer SDGs INFID, Bona Tua

• Pada akhir penutup, masyarakat sipil menyambut baik konsultasi publik ini. Hal ini menunjukkan komitmen dari presiden dalam penanganan COVID-19 terutama bagi kemendagri dan jajarannya. Dalam krisis pandemi, dampaknya tidak hanya kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan namun juga sejauh mana pemerintah merespon permasalahan dan dampak yang dialami warganya. Gotong royong bukan hal baru, namun kunci utama dalam menanggulangi pandemi. SE mendagri sudah memperkuat bahwa jegara hadir dalam bentuk Kerjasama nyata, gotong royong bersama rakyatnya. Kami berharap dari Bali, kerjasama ini dapat meluas dan menjadi lompatan transformasi tidak hanya dalam pandemi namun juga dalam era kenormalan baru.

LAMPIRAN

1. Daftar liputan

Daftar Liputan Konsultasi Publik COVID BALI

NO	NAMA MEDIA	JUDUL ARTIKEL	LINK
1	Kemendagri.go.id	Bangun Sinergi Tangani Covid-19 dengan LSM dan Ormas, Kemendagri Adakan Konsultasi Publik di Bali	https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/30327/bangun-sinergi-tangani-covid-19-dengan-lsm-dan-ormas-kemendagri-adakan-konsultasi-publik-di-bali
2	AntaraNews	Kemendagri adakan konsultasi publik penanganan COVID-19 di Bali	https://www.antaranews.com/berita/1905596/kemendagri-adakan-konsultasi-publik-penanganan-covid-19-di-bali
3	TEMPO.CO	Kemendagri Konsultasi Publik Tangani Pandemi Covid-19	https://nasional.tempo.co/read/1416355/kemendagri-konsultasi-publik-tangani-pandemi-covid-19/full&view=ok
4	Tribun News	Kemendagri Gelar Konsultasi Publik Terkait Penanganan Covid-19	https://aceh.tribunnews.com/2020/12/20/kemendagri-gelar-konsultasi-publik-terkait-penanganan-covid-19
5	iNewsBali.id	Bangun Sinergi Tangani Covid-19, Kemendagri Gelar Konsultasi Publik di Bali	https://bali.inews.id/berita/bangun-sinergi-tangani-covid-19-kemendagri-gelar-konsultasi-publik-di-bali
6	Cobisnis.com	Pemerintah Gelar Konsultasi Publik Tangani Covid-19 dan PEN di Bali, NTB, dan NTT	http://cobisnis.com/pemerintah-gelar-konsultasi-publik-tangani-covid-19-dan-pen-di-bali-ntb-dan-ntt/
7	Jendelanasional.id	Tatanan Bali Era Baru, Masyarakat Produktif dengan Kesadaran Protokol Kesehatan	https://jendelanasional.id/headline/tatanan-bali-era-baru-masyarakat-produktif-dengan-kesadaran-protokol-kesehatan/
8	Nusabali.com	Hari Ini Kemendagri Adakan Konsultasi Publik di Bali	https://www.nusabali.com/index.php/berita/86745/hari-ini-kemendagri-adakan-konsultasi-publik-di-bali
9	AntaraNews	Kemendagri undang ormas dan LSM untuk konsultasi publik di Bali	https://www.antaranews.com/berita/1905624/kemendagri-undang-ormas-dan-lsm-untuk-konsultasi-publik-di-bali
10	IndoNews.id	Penanganan COVID-19, Bali Patuh pada Arahan Pemerintah Pusat Termasuk Cegah Kerumunan	https://indonews.id/artikel/314703/Penanganan-COVID-19-Bali-Patuh-pada-Arahan-Pemerintah-Pusat-Temasuk-Cegah-Kerumunan/
11	Okezone	Ironis, Masih Ada APBD 'Nganggur' Rp247 Triliun!	https://economy.okezone.com/read/2020/12/21/320/2331634/ironis-masih-ada-apbd-nganggur-rp247-triliun
12	Detik.com	Atasi COVID-19, Kemendagri Gelar Konsultasi Publik dengan LSM & Ormas	https://news.detik.com/berita/d-5303463/atasi-covid-19-kemendagri-gelar-konsultasi-publik-dengan-lsm--ormas

NO	NAMA MEDIA	JUDUL ARTIKEL	LINK
Liputan TV dan Siaran Video			
1	LIVE STREAMING YOUTUBE		https://www.youtube.com/watch?v=JrUqkXxfv3w&t=40s
2	Liputan TVRI BALI		https://www.youtube.com/watch?v=iyeb2g3jD68&feature=youtu.be

2. Daftar hadir daring

Registration Report	Konsultasi Publik Untuk Pencegahan Penularan COVID-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali	
Report Generated:	23-12-20 14:55	
Topic	Webinar ID	Scheduled Time
	928 1738 7655	21-12-20 8:00

Attendee Details

No	First Name	Last Name
1	Yayasan	Alief Pelita Bangsa
2	Bagus	Mitra Samya
3	Susiwijono	Moegiarso
4	I Wayan Sudiarta	Diskop kabupaten
5	Romi	Kemenko Perekonomian
6	Ramdani	Kemenko Perekonomian
7	Hersan	Hadi
8	I Nyoman Widia	Darma
9	Bappeda	Kab.Klungkung
10	Diskop,UKM,	Dag, Kab.Klungkung
11	Ni Made Adi Swapatni	Dinkes Kab. Klungkung
12	Badan	Kesbangpol Kab Gianyar
13	dr.Nurhandini Eka Dewi Sp A	DinkesNTB
14	Andre	Dananjaya
15	Diparda	Gianyar
16	DISKOPUKMPERDAG	
17	Ida	Bagus Putrayasa - Bappeda Provinsi Bali
18	Diskop	UKM GIANYAR
19	Sahmad	PT. Bank NTB Syariah
20	Tatat	
21	ADC	Menkop & UKM RI

No	First Name	Last Name
22	ida	ayu megawati
23	DINAS	KOPERASI UKM PROV NTB
24	Sergina	LONCLE
25	bayu	BAPPEDA PROV BALI
26	IAURENSIUS/Kerjasama	Lembaga Non Pemerintah
27	Perkumpulan SOLUD	Fadlli
28	Khairul	Akbar - Bappeda dompu
29	Ida	Bgs Putra Kusuma
30	KESBANGPOL	NTB
31	WALIKOTA	BIMA
32	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Kabupaten Klungkung
33	Baperlitbang	Klungkung, W. Suarni
34	Baperlitbang	Klungkung
35	BaperlitbangKabKlungkung-Kadek	Yogasiana
36	Dinkes	Kab. Sumbawa (Drs. H. Didi Darsani, Apt.)
37	Plan	International Indonesia-Syamsu Salewangang
38	Sri	Wirawati
39	Adhi	Susantio
40	ADC	MENKOP
41	PEMKOP	DISKOP
42	DESKRBN	
43	ABDUL	WAIDL
44	Putu Erna	Damayanti
45	Bappeda	Provinsi NTB
46	Erwin	Noviandi
47	Ilyas	Lubis
48	bappeda	dan litbang kab.gianyar
49	Adyani	Widowati
50	I GEDE DODI	HENDRAWAN
51	Esther	Parapak
52	I Wayan Darmanaba	Darmanaba
53	Billy	Hagantha Sembiring
54	BAPPEDA	KABUPATEN TTS
55	Dinas	Pariwisata Sumbawa
56	Kabupaten	Sumbawa
57	Baperlitbang	Klungkung
58	Bank	NTB Syariah - Divisi REN
59	Kesbangpol	Kota Denpasar
60	apriadi	kusuma bagian pemerintahan
61	Amry	Rakhman Bappeda NTB

No	First Name	Last Name
62	Menkop	UKM
63	riesta	karentina
64	Dhanny	Ford Foundation
65	denny	BPJS
66	Bappeda	Sumbawa
67	Bappeda	Kota Denpasar_Mira Saka
68	Friezca	Fasker
69	Rizka	Antika
70	Dinas	Pariwisata Kota Denpasar
71	Riza	Damanik
72	Zul Ashfi	Mendrofa
73	Humas	KemenkopUKM
74	Haji	udin
75	SETDA	NTT
76	Nanang Subana	Dirja
77	Pemerintah	Kota Bima
78	Chrisma	Albandjar
79	bely	utarja
80	Sahmad	
81	Arthur	Bappeda
82	Cattleya	
83	Dr.Danang	
84	Bagaskara	Asdep KUMKM Ekon
85	Sanggita	Kemenko Ekon
86	bakesbangpoldagri	kabsumbawa
87	Iwan Faidi	Kemenko Perekonomian
88	Niken	Pudjilestari
89	Dinas	Pariwisata Prov. NTB
90	Ayu	Sulistyowati
91	Christina Ingrid Lau	Ingrid
92	Kesbangpol	Sumbawa
93	Hari	Suseno
94	Gusti	Ayu Ambarawati - Kemendagri
95	Deni	Supoyo
96	Jasmine	Gita/ Kemenko Perekonomian
97	Ari	Dharma Stauss
98	muhammad taufiq	mansyur
99	Hadi	H / Kemenko Ekon
100	Tatat	INFID
101	wina natalia	natalia

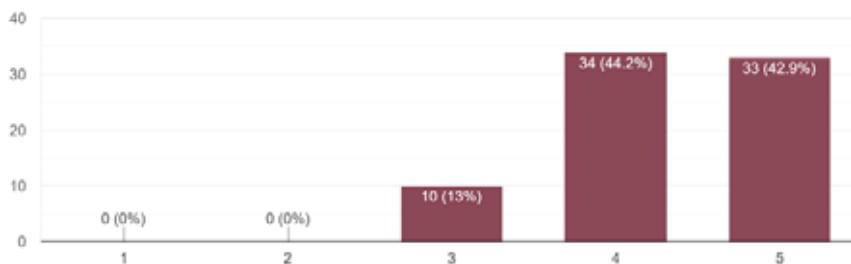
No	First Name	Last Name
102	raja	alief
103	Farah	Sofa
104	Badan Penghubung Daerah	Pemprov NTB
105	Dr safrizal za	Dirjen Dagri
106	PUSFASKER	KDN
107	Bidang SDA Bappeda Bali	Keuangan dan Investasi
108	TMM	Ruby F
109	Kesbangpol	Denpasar
110	Ketut	Kusmayadi
111	Zahratun	Atun
112	IKAK	Patriastomo
113	Haris	Oematan
114	ahsan	wahab
115	Mustafa	
116	MADE	KRISNA DINATA
117	Denisa	Kawuryan
118	Teuku	Candra kirana
119	ahmad	fajri

3. Respon Peserta untuk Evaluasi Konsultasi Publik Bali

Kualitas Materi Konsultasi Publik

Sangat Tidak Setuju 1-2-3-4-5 Sangat Setuju

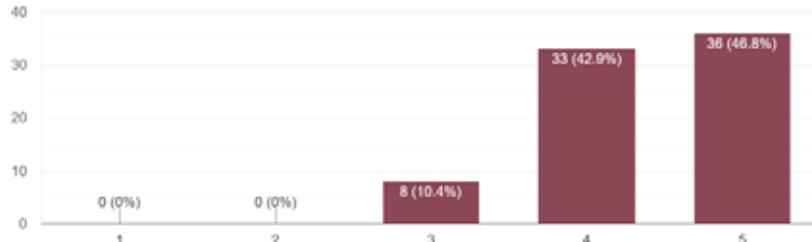
Materi konsultasi publik terorganisasi dengan baik dan mudah dimengerti
77 responses



Kualitas Materi Konsultasi Publik

Sangat Tidak Setuju 1-2-3-4-5 Sangat Setuju

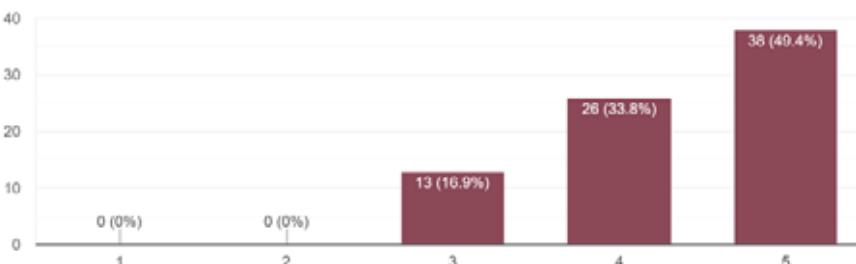
Materi konsultasi publik memudahkan saya untuk mengetahui urgensi kemitraan dan kolaborasi multipihak, serta menyusun rencana tindak lanjut ...k ekonomi dari Coronavirus Disease di daerah saya
77 responses



Penyampaian/Pemaparan Materi

Sangat Tidak Setuju 1-2-3-4-5 Sangat Setuju

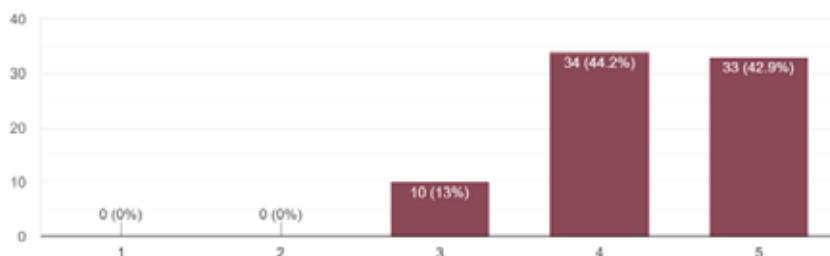
Pemateri sangat memahami materi yang dipresentasikan
77 responses



Penyampaian/Pemaparan Materi

Sangat Tidak Setuju 1-2-3-4-5 Sangat Setuju

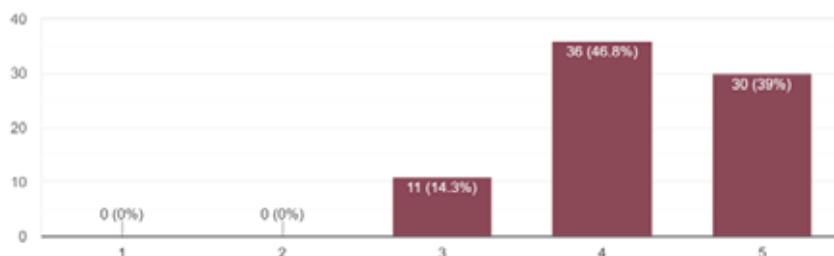
Pemateri mempresentasikan isi materi dengan baik; mudah dimengerti dan diimplementasikan
77 responses



Diskusi/ Tanya Jawab

Sangat Tidak Setuju 1-2-3-4-5 Sangat Setuju

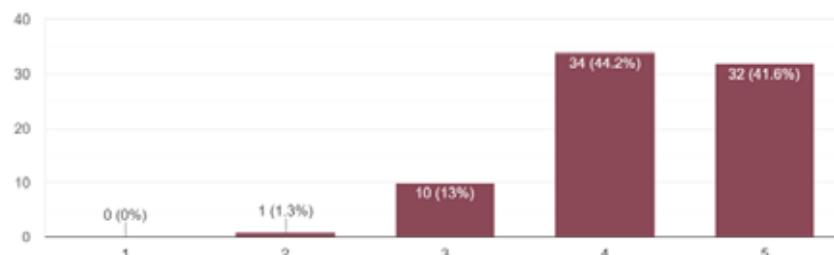
Alokasi waktu diskusi mencukupi untuk memperkuat pemahaman materi konsultasi publik
77 responses



Diskusi/ Tanya Jawab

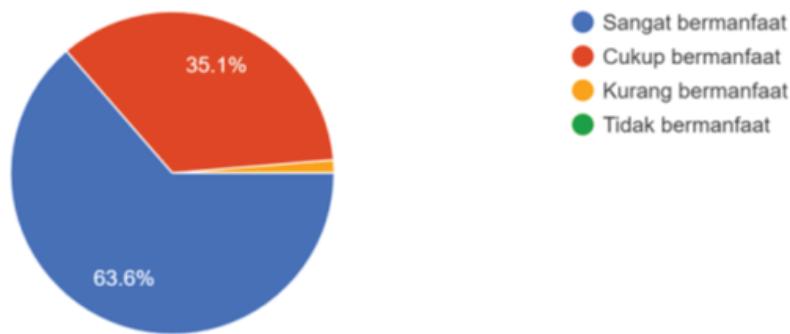
Sangat Tidak Setuju 1-2-3-4-5 Sangat Setuju

Pemateri memberikan jawaban baik terhadap pertanyaan peserta
77 responses



Pertanyaan Umum

Apakah diskusi publik ini bermanfaat untuk anda?



Tuliskan saran anda terkait hal-hal yang menurut anda masih perlu didiskusikan

- Penguatan ketahanan perekonomian daerah wisata
- Yang disampaikan hanya data, kiranya disampaikan pula solusi dan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi
- Penjelasan lebih detail mengenai kerjasama pemerintah dengan Ormas, terutama Ormas apa saja yang bisa diajak kerjasama
- Metode-metode kerjasama yang bisa dilakukan pemerintah
- Melibatkan lebih banyak OPD terkait
- Lebih banyak diskusi terkait solusi penanganan pandemi
- Kemampuan pemerintah daerah mengakses dana PEN

Tuliskan saran anda terkait hal-hal yang menurut anda masih perlu didiskusikan

- Para UMKM dapat menghasilkan jenis produksi yang berkualitas ekspor
- Perlu mandatangkan pelakunya secara langsung untuk menjadi narasumber untuk bisa memberikan perspektif dari sisi pelaku usaha, bisa sampai grass rootnya.
- UMKM perlu jaringan pemasaran
- Perlu ada edukasi ke masyarakat untuk tidak perlu takut melakukan aktivitas bisnisnya, namun tetap dengan menjaga pola hidup sehat, prokes 4M menjadi pedoman
- Harapannya kedepan ada penjelasan lebih bersifat teknis dan lebih telihat proses kemitraan dari awal dan implementasinya
- Sosialisasi SE Mendagri perlu dilakukan di semua provinsi dan kabupaten/kota
- Komitmen Pemerintah Pusat terhadap Swakelola Tipe 3
- Program kegiatan yang melibatkan mitra lokal semakin digiatkan.

Apakah anda mempunyai saran atau kritik untuk perbaikan konsultasi publik ini ke depan

- Pentingnya libatkan masyarakat sipil dan semua sektor dalam percepatan penanganan stunting
- Konsultasi seperti ini mohon dijadwalkan secara periodik di tahun 2021. Perlu setiap daerah melakukan hal serupa untuk sharing pendapat
- Konsultasi Publik sangat bagus diselenggarakan kami sarankan agar dilaksanakan lebih intens.
- Diberikan akses terbuka, atau bisa disiarkan di TV agar seluruh pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi
- Ke depan sebaiknya dihadirkan juga UMKM yg sukses ditengah pandemi covid - 19 sbg testimoni sukses sekaligus motivasi bagi yang lain
- Agar berita mengenai data kasus Covid-19 lebih transparansi disampaikan ke media lewat satu pintu. Sehingga data yang disampaikan ke media lewat kanal pemerintah dan swasta bisa online dan publikasi yang disampaikan sangat legalitas, dan bisa bekerja sama dengan pihak swasta
- Sudah bagus (1) dengan menggabungkan daring dan luring. (2) Provinsi lain yakni NTB dan NTT juga perlu diberikan waktu untuk presentasi
- Diharapkan salah satu narasumbernya berasal dari daerah yang telah menjalankan swakelola tipe 3 sebagai sharing good practice



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

